



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2022



DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP
Jl. Langkap No. 1 Cilacap Telp/Fax.(0282) 542202



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022, maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai dokumen yang memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renja Sekretariat Daerah;
 2. Renja Sekretariat DPRD;
 3. Renja Inspektorat;
 4. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renja Dinas Kesehatan;
 6. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Renja Dinas Sosial;
 10. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Renja Dinas Perhubungan;
 12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 17. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Renja Dinas Pertanian;
22. Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;
23. Renja Dinas Perikanan;
24. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
27. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renja Kecamatan Adipala;
31. Renja Kecamatan Bantarsari;
32. Renja Kecamatan Binangun;
33. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renja Kecamatan Cimanggu;
37. Renja Kecamatan Cipari;
38. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renja Kecamatan Jeruklegi;
41. Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Renja Kecamatan Kedungreja;
45. Renja Kecamatan Kesugihan;
46. Renja Kecamatan Kroya;
47. Renja Kecamatan Majenang;
48. Renja Kecamatan Maos;
49. Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Renja Kecamatan Patimuan;
51. Renja Kecamatan Sampang;
52. Renja Kecamatan Sidareja;
53. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan LIII, Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **2 AUG 2021**

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **2 AUG 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2022 YANG DISAHKAN

No	No.Urut Lampiran	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	I	Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
2.	II	Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap
3.	III	Inspektorat Kabupaten Cilacap
4.	IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
5.	V	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
6.	VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
7.	VII	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap
8.	VIII	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap
9.	IX	Dinas Sosial Kabupaten Cilacap
10.	X	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
11.	XI	Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
12.	XII	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap
13.	XIII	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
14.	XIV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
15.	XV	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Cilacap
16.	XVI	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
17.	XVII	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
18.	XVIII	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap
19.	XIX	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
20.	XX	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
21.	XXI	Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
22.	XXII	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
23.	XXIII	Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
24.	XXIV	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap
25.	XXV	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap
26.	XXVI	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
27.	XXVII	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
28.	XXVIII	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap
29.	XXIX	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

1	2	3
30.	XXX	Kecamatan Adipala
31.	XXXI	Kecamatan Bantarsari
32.	XXXII	Kecamatan Binangun
33.	XXXIII	Kecamatan Cilacap Selatan
34.	XXXIV	Kecamatan Cilacap Tengah
35.	XXXV	Kecamatan Cilacap Utara
36.	XXXVI	Kecamatan Cimanggu
37.	XXXVII	Kecamatan Cipari
38.	XXXVIII	Kecamatan Dayeuhluhur
39.	XXXIX	Kecamatan Gandrungmangu
40.	XL	Kecamatan Jeruklegi
41.	XLI	Kecamatan Kampunglaut
42.	XLII	Kecamatan Karangpucung
43.	XLIII	Kecamatan Kawunganten
44.	XLIV	Kecamatan Kedungreja
45.	XLV	Kecamatan Kesugihan
46.	XLVI	Kecamatan Kroya
47.	XLVII	Kecamatan Majenang
48.	XLVIII	Kecamatan Maos
49.	XLIX	Kecamatan Nusawungu
50.	L	Kecamatan Patimuan
51.	LI	Kecamatan Sampang
52.	LII	Kecamatan Sidareja
53.	LIII	Kecamatan Wanareja

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

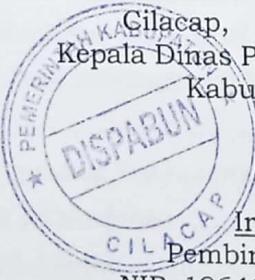
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan dalam Rencana Kerja ini.

Gilacap, Agustus 2021
Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Cilacap



Ir. SUSILAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19641108 199103 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPABUN Tahun 2021 dan Capaian Renstra DISPABUN Tahun 2017-2022	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISPABUN Kab. Cilacap	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan	31
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN	125
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	126
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kab. Cilacap.....	70
3.3. Inovasi DISPABUN Kab. Cilacap	130
3.4. Program dan Kegiatan DISPABUN Kab. Cilacap	132
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	134
BAB V PENUTUP	201
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	201
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	202
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	202

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan s/d Tahun 2021 Kabupaten Cilacap.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	27
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022	36
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	62
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	127
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan Dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	135

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kabupaten Cilacap memiliki lahan sawah yang cukup luas dengan produksi padi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun terjadi fluktuasi jumlah produksi setiap tahun. Produksi padi yang fluktuatif tersebut berdampak pada Ketersediaan pangan utama setiap tahun. Adapun Ketersediaan pangan utama, Ketersediaan Energi dan Protein perkapita di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2020 sebagai berikut :

No.	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (Beras) (%)	239	318,12	147	185
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)	100	100	100	100

Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi di bidang perkebunan dengan beberapa tanaman perkebunan yang mampu tumbuh dan berkembang dengan cukup baik yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa deres, kopi, kakao, pala, lada, cengkeh, karet serta tanaman rempah penyegar lainnya (kemukus, kapulaga, nilam, dll). Sedangkan yang menjadi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Cilacap adalah tanaman kelapa. Berikut ini tersaji Data Produksi dari 8 (delapan) tanaman perkebunan potensi di Kabupaten Cilacap dari Tahun 2017 –

2020.

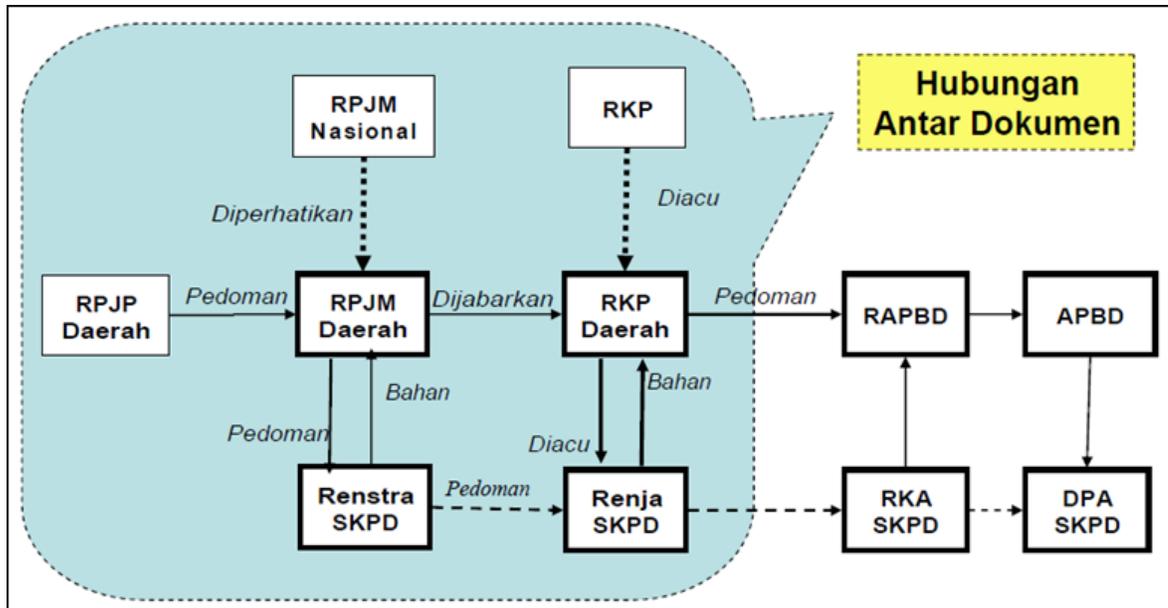
No.	Komoditas Perkebunan	Produksi (Tahun)			
		2017	2018	2019	2020
1	Kelapa Dalam	12.908,60	11.579,74	14.564,38	13.939,63
2.	Kelapa Deres	44.480,24	42.689,55	42.573,51	43.957,76
3.	Kopi Robusta	130,31	108,18	134,54	135,13
4.	Kakao	62,05	50,59	64,87	64,04
5.	Lada	33,46	27,80	38,57	37,58
6.	Cengkeh	340,76	653,37	335,59	333,14
7.	Karet	1.746,05	2.526,32	3.068,38	3.104,58
8.	Pala	10,06	27,51	75,13	66,67

Dengan adanya potensi di urusan Pangan dan Sub Urusan Perkebunan tersebut maka diperlakukan perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan yang ada dan dibuat menjadi sebuah Dokumen Perencanaan pembangunan yang merupakan pedoman dan arah kebijakan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dibutuhkan keselarasan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu : RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 – 2022, Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap.

Gambar I.2
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah :

- (1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- (2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (4). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- (6). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).
- (7). Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- (9). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (10). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (11). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (12). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
- (13). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
- (14). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
- (15). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- (16). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);
- (17). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 175);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun dengan maksud :

- 1). Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan serta sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah :

- 1). Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap;
- 2). Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap;

- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narasi pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan perencanaan dan penganggaran yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Narasi daftar Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait dengan Renja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Narasi sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat narasi analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, faktor penghambat / permasalahan yang harus diselesaikan, tindak lanjut penanganan permasalahan. Memuat Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan umum kinerja pelayanan OPD dan upaya penanganan. Memuat Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memuat isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

2.4. Review terhadap RKPD.

Berisikan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Memuat Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Memuat Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berisikan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

3.3 Inovasi Perangkat Daerah

Berisikan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada Perangkat Daerah.

3.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Berisikan narasi program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Memuat Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Tabel 4.2. Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 dengan KepMen 050/3708/2020.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Tahun 2017 - 2022.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perkebunan (DSPABUN) Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan DISPABUN Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan urusan pangan dan sub urusan perkebunan di tahun – tahun yang akan datang.

Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2020 mengelola anggaran setelah Refocusing Anggaran yaitu Belanja langsung sebesar Rp. 3.666.626.502,- yang dialokasikan untuk 7 program dan 36 kegiatan, realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. Belanja Langsung Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sampai dengan Bulan Desember 2020 dapat terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.433.893.967,- atau 93,65 persen dan realisasi fisik tercapai 98,02 persen.

Secara umum kegiatan di Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan rencana walaupun beberapa pekerjaan yang telah dialokasikan di anggaran definitif tidak dapat dilaksanakan karena terkena refocusing anggaran. Kegiatan pangan dan perkebunan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar tingkat manfaat / sasaran kegiatan tersebut sesuai harapan masyarakat. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
231.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparat yang telah mengikuti Diklat/pendidikan/Pelatihan	100	0	100	100	100	0	100	100
203.5.1	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta mengikuti pelatihan/diklat teknis		0	1	1	100	0	1	
		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	36	12	12	100%	12	60	
203.1.10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor DISPABUN		36	12	12	100%	12	60	
203.1.13	Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		36	12	12	100%	12	60	
203.1.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat karyawan dan tamu kantor DISPABUN		36	12	12	100%	12	60	
203.1.11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor DISPABUN		36	12	12	100%	12	60	
203.1.18	Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah		36	12	12	100%	12	60	
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	12	12	100	12	60	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
203.1.2	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor DISPABUN		36	12	12	100	12	60	
203.1.7	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Honorarium PNS dan Non PNS DISPABUN		36	12	12	100	12	60	
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		0	0	0	0	58	58	
203.2.24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor DISPABUN		90	30	30	100%	30	150	
203.2.28	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor DISPABUN		90	61	61	100%	27	178	
203.2.22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Luas gedung kantor DISPABUN		2415	805	805	100%	28	3248	
203.2.42	Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				1	0	0	0%	1	2	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
231.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	- Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	100	100	100	100	100	100	100	100
		Keg.Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelola infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	7	0	0	0	0	5	1	
203.16.57	Keg. Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Sub. Keg.Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah pengembangan lumbung pangan masyarakat		1	0	0	0%	1	2	
231.16.62	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukung Lainnya (DAK)		Jumlah pengembangan lumbung pangan masyarakat (DAK)		2	0	0	0	2	4	
			Survey dan inventarisasi lumbung pangan masyarakat		1	0	0	0	1	2	
203.16.39	Keg. Pengembangan Cadangan Pangan	Sub. Keg. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah pengembangan cadangan pangan masyarakat		3	1	1	100%	1	5	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan	91.5	86.2	88.6	84.4	95%	91.5	3	95%

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		9=(8/7)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	45	0	0	0	0	40	7	
203.16.41	Keg. Pemantauan Ketersediaan Pangan	Sub. Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan		3	1	1	100%	1	5	
203.16.5	Keg. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah		Rakor Dewan Ketahanan Pangan Kab. Cilacap		3	1	1	100%	0	4	
			Updating Data Ketahanan Pangan		3	1	1	100%	1	5	
231.16.14	Keg. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Sub. Keg. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa Mandiri Pangan		3	4	4	100%	7	14	
231.18.38	Keg. Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan		Jumlah pembuatan kebun percontohan		1	0	0	0	1	2	
231.18.30	Pengembangan perbenihan perkebunan.		Jumlah pemeliharaan perbenihan perkebunan		3	3	3	100%	3	9	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
303.17.29	Keg. Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan		Jumlah pengembangan perkebunan organik		10	2	2	100%	4	16	
303.18.51	Keg. Pengembangan tanaman perkebunan		Jumlah pengembangan tanaman perkebunan		279,548	13,020	13,020	100%	36,500	329,068	
303.18.50	Keg. Peremajaan tanaman perkebunan		Jumlah peremajaan tanaman perkebunan		38640	10,000	10,000	100%	15,000	63,640	
231.18.37	Keg. Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan		Pembuatan bibit perkebunan di UPTD Pembibitan		10	6	6	100%	5	21	
303.18.29	Keg. Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan		Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan		14	5	5	100%	5	24	
303.18.13	Keg. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)		Peningkatan kualitas bahan baku industri tembakau (DBHCHT)		6	10	10	100%	6	22	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
303.17.30	Keg. Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan		Penyusunan data statistik perkebunan		4	1	1	100%	1	6	
203.16.41	Keg. Pemantauan Ketersediaan Pangan	Sub.Keg. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			4	0	0	0	2	6	
203.16.63	Keg. Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHC HT)	Sub. Keg.Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			1	0	0	0	0	1	
203.16.10	Keg.Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat										
203.16.10	Keg.Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Sub. Keg.Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			6	1	1	100%	5	12	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		9=(8/7)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan	35	-	0	0	0	30	25	
203.16.9	Keg. Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan	Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita per Tahun			3	1	1	100%	1	5	
303.17.2	Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			4	3	3	100%	5	12	
203.16.59	Keg. Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHC HT).				5	0	0	0	0	5	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
203.16.9	Keg. Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan				9	2	2	100%	2	13	
203.16.16	Keg. Pengembangan Diversifikasi Tanaman				25	0	0	0	15	40	
303.15.17	Keg. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan				230	0	0	0	80	310	
303.16.16	Keg.Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan				6	0	0	0	4	10	
203.16.44	Pengembangan Pangan Lokal				7	2	2	100%	3	12	
203.16.45	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal				9	0	0	0	1	10	
203.16.51	Pengembangan Diversifikasi Pangan				9	1	1	100%	5	15	

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
303.17.31	Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan				490	0	0	0	200	690	
303.15.18	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih Perkebunan				160	0	0	0	80	240	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Ditangani	95	93.47	93	93.16	100.17%	94	80	
		Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Rawan Pangan	1	1	1	1	100	1	0	
203.16.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Sub. Keg.Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			1	0	0	0%	1	2	
		Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima penanganan rawan pangan	20	-	0	0	0	18	2	
203.16.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Sub. Keg.Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5	1	1	100%	2	8	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	20	30	12	36	300%	16	44	220%

Kode	Program / Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan KepMendagri 050-3708 Th. 2020	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diregistrasi	10	15	6	18	300%	8	22	
203.16.22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Sub. Keg. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			15	2	2	100%	6	23	
203.16.43	Promosi Keamanan Pangan				4	2	2	100%	2	8	
203.16.49	Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry				550	0	0	0	550	1,100	
203.16.50	Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan Segar	Sub.Keg. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			-	0	0	0	1	1	
203.16.50	Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan Segar	Sub.Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1	100%	1	3	

Dari Tabel 2.1 tersebut diatas di Tahun 2020 hampir semua indikator Program sudah memenuhi target kinerja, hanya pada indikator Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) dari target skor 88,6, tercapai skor 84,4 hal ini karena juga adanya pandemi Covid-19 berdampak pada keragaman konsumsi pangan masyarakat yang berkurang (kurang seimbangya kebutuhan konsumsi energi, protein serta buah-buahan dan lain-lainnya).

Di Tahun 2020 juga terjadi refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga realisasi beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti pada sub kegiatan Penyediaan infrastruktur lumbung pangan pada pekerjaan survey lumbung pangan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada Sub. Keg. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal juga terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 yaitu pembuatan kebun percontohan serta sosialisasi/bimtek/pelatihan kegiatan-kegiatan peremajaan dan pengembangan tanaman perkebunan. Selain itu pada sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dan Sub. Keg. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan juga mengalami refocusing anggaran. Pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal juga beberapa pekerjaan mengalami refocusing anggaran seperti pekerjaan Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat (DBHCHT), Diversifikasi tanaman, Promosi penganekaragaman konsumsi pangan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan agribisnis masyarakat perkebunan, Promosi dan pemasaran hasil perkebunan, pelatihan penangkar benih perkebunan, Pelatihan pengolahan hasil perkebunan.

Pada program Penanganan Kerawanan Pangan realisasi program tercapai 93,16% dari target 93% karena pada program ini terdapat pengadaan bahan pangan untuk penanganan covid-19 dan penanganan rawan pangan, namun pada sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tidak dapat dilaksanakan penyusunan peta kerawanann dan kerentanan pangan karena mengalami refocusing anggaran.

Program Pengawasan Keamanan Pangan pada sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota pada pekerjaan pembinaan keamanan pangan pada home industry dan sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan karena mengalami refocusing anggaran.

Sedangkan capaian kinerja Program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2021 belum semua sesuai target karena masih akan dilakukan upaya pelaksanaan capaian pada semester II Tahun 2021. Sedangkan yang sudah mencapai target yaitu pada Program Pengawasan Keamanan Pangan dari target 16% sudah tercapai 44%.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan di Tahun 2020 adalah :

- Terlaksananya program/kegiatan yang terbatas sesuai dengan hasil alokasi anggaran setelah refocusing.
- Sasaran penerima bantuan sesuai dengan rekomendasi.
- Tersalurnya bantuan bahan pangan sesuai skala prioritas.
- Tersedianya data ketersediaan protein dan energi (Sumber data : Dinas Pertanian Kab. Cilacap).
- Kerjasama yang cukup baik antar stake holder yang terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan (petugas Dispabun, perangkat desa serta kecamatan, petani/ kelompok tani /gapoktan/ masyarakat/ Dinas/Instansi/ Lembaga lain).

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mendorong lebih baiknya pencapaian target kinerja program/kegiatan adalah :

- Urusan pangan merupakan urusan yang penting karena merupakan kebutuhan hidup sehari-hari yang harus terpenuhi (hak setiap manusia), sehingga sangat diperlukan ketersediaan dan akses pangan yang memadai, pangan yang bergizi beragam seimbang dan aman dikonsumsi oleh setiap manusia.
- Sub Urusan perkebunan merupakan salah satu sektor di urusan pertanian yang mampu memberikan dampak / kontribusi yang cukup nyata dalam memberikan tambahan pendapatan bagi petani/kelompok tani, baik dalam bentuk hasil panen langsung maupun turunan hasil olahannya, seperti kelapa, pala, kopi, cengkeh, lada, karet, dan kaka

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Dinas Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap bukan merupakan OPD pengampu SPM, sehingga pencapaian kinerjanya tidak diukur melalui pencapaian SPM, tetapi hanya mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap. Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan terbagi dalam pelayanan urusan pangan, sub urusan perkebunan dan pelayanan administrasi perkantoran (rutin). Adapun kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan selengkapnya seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Cilacap

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra DISPABUN				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	PANGAN												
1	Pola Pangan Harapan (Skor)			% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan (9 kelompok pangan : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, lainnya).	85,8	88,6	91,5	94,3	86,2	84,4	91,8	94,9	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)			Ketersediaan energi per kapita/hari (kkal) dibagi 2.400 kkal dikalikan 100 persen. Ketersediaan protein per kapita/hari (gram) dibagi 63 gram dikalikan 100 persen.	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase daerah rawan pangan yang ditangani (%)			Jumlah permohonan yg ditangani Jumlah permohonan yg masuk %	92	93	94	95	3178 0 kg 3400 0 kg 93,47	37.18 0 kg 39.91 0 kg 93,16	94	95	
4	Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (unit)			Angka Banyaknya/ Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan, Toko Tani, PUPM, Usaha Perorangan dll)	38	43	48	53	39	50	48	53	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya (%)			Jumlah makanan yang sudah tidak mengandung bahan berbahaya	(20-2)	(20-3)	(20-4)	(20-5)	(20-9)	(20-9)	(20-13)	(20-15)	
				Jumlah makanan yang masih mengandung bahan berbahaya	20	20	20	20	20	20	20	20	
				%	90	85	80	75	55	55	35	25	
6	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi (%)			Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diregistrasi	4	6	8	10	15	18	19	21	
				Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menjadi target registrasi	50	50	50	50	50	50	50	50	
				%	8	12	16	20	30	36	38	42	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B.	PERKEBUNAN												
1	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina (%)			Jumlah Kelompok tani perkebunan yang telah dilakukan pembinaan	30	35	40	45	31	49	42	45	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	4,87	5,69	6,50	7,34	5,06	7,99	6,85	7,34	
2	Persentase kelompok tani yg diikutsertakan dlm promosi hasil perkebunan (%)			Jumlah kelompok tani yg diikutsertakan dlm promosi	8	10	13	15	9	2	13	15	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	1,33	1,67	2,00	2,44	1,47	0,33	2,00	2,44	
3	Persentase Petani & kel tani perkebunan yg memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (%)			Jumlah petani & kel tani perkebunan yg memanfaatkan teknologi tepat guna	27	37	47	58	27	42	50	60	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	4,33	6,00	7,67	9,46	4,40	6,85	8,15	9,78	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(0)	(11)	(12)	(13)	
4	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)			Angka Produksi komoditas perkebunan selama Satu Tahun.	60.447,01	60.654,48	60.862,63	61.071,55	60.855,00	61.638,53	60.960	61.080,00	

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) semua indikator program sudah mencapai dan melebihi target yaitu pada indikator Menurunnya jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya yang ditarget 85% dapat mencapai 55% (tingkat capaian realisasi 135%). Indikator Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang teregistrasi yang ditarget 12% dapat mencapai 36% (tingkat capaian realisasi (300%), Indikator Pola Pangan Harapan dengan target skor 88,6 tercapai skor 84,4 (tingkat capaian realisasi 95,26%), Penanganan rawan pangan dari target 93% dapat mencapai 93,16% (tingkat capaian realisasi 100,17%) dan Indikator Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat yang ditarget 43 unit dapat mencapai 50 unit (tingkat capaian realisasi 116,28%). Sedangkan pada realisasi kegiatan semua dapat tercapai 100%.

Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) belum dapat tercapai 100% dari target karena hal ini berkaitan dengan keberagaman konsumsi pangan masyarakat dari 9 kelompok bahan pangan sebagai indikator Skor PPH. Makanan yang dikonsumsi masih didominasi karbohidrat/energi dari beras, masih rendahnya konsumsi energi dari umbi-umbian, pangan hewani (telur, daging, ikan) cukup dikonsumsi, sayur dan buah juga cukup dikonsumsi, kacang-kacangan dan minyak belum mencukupi dikonsumsi.

Pada sub urusan Perkebunan ada 4 program, namun yang mencapai target dan melebihi target yaitu pada program Peningkatan kesejahteraan petani dengan indikator Cakupan kelompok tani yang dibina dengan target 5,69% tercapai 7,99% (tercapai 140%), sedangkan indikator Produksi komoditas perkebunan dengan target 60.654,48 ton tercapai 61.638,53 ton (tercapai 101,62%). Sedangkan indikator persentase kelompok tani yang diikutsertakan promosi hasil perkebunan dengan target 1,67% tercapai 0,33% karena tidak dapat mengikuti pameran/promosi yang biasanya dilaksanakan tiap tahun, namun adanya pandemi/wabah covid-19 hanya dapat mengikutsertakan promosi komoditas perkebunan pada pembukaan Toko Mitra Tani Jl. Pemintalan Cilacap. Sedangkan indikator persentase petani dan kelompok tani perkebunan yang memanfaatkan teknologi tepat guna dari target 6% dapat tercapai sebesar 6,85% (114,17%). Faktor penyebab indikator yang belum tercapai karena adanya pandemi Covid-19 mulai Bulan Maret 2020, pelaksanaan kegiatan dihentikan karena tidak memungkinkan dilaksanakan pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan

pelatihan dan juga kegiatan – kegiatan mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran.

Terkait dengan hal tersebut upaya yang akan dilakukan adalah terus melaksanakan pembinaan kepada petani / kelompok tani agar tetap dapat memanfaatkan Teknologi Tepat Guna serta produksi komoditas perkebunan (8 komoditas perkebunan) akan dilakukan perhitungan di Tahun 2021 dan 2022 sehingga diharapkan di akhir Renstra / RPJMD dapat tercapai.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan.

DISPABUN Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan Pangan dan Urusan Pertanian sub urusan Perkebunan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Cilacap yang perlu mendapatkan penanganan pada Tahun 2022 dan khususnya dalam pencapaian target kinerja pada Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 adalah belum optimalnya pencapaian target kinerja sub urusan perkebunan. Adapun permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, yaitu :

- 1) Permasalahan pangan :
 - a. Kabupaten Cilacap dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang tersebar sehingga mengakibatkan belum optimal dalam keterjangkauan akses dan distribusi pangan masyarakat.
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
 - c. Kabupaten Cilacap memiliki potensi sebagai daerah yang rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan dll) serta masih adanya penduduk yang tergolong miskin (rawan pangan kronis).

2). Permasalahan perkebunan :

- a. Masih kurangnya pemeliharaan tanaman perkebunan di tingkat petani sehingga belum optimalnya produksi komoditas perkebunan.
- b. Masih kurangnya pengembangan dan penerapan inovasi serta masih kurangnya daya saing produk perkebunan di tingkat petani/kelompok tani.
- c. Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM dan kemampuan kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan).

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan pangan dan perkebunan di Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasi beberapa isu -isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pangan dan perkebunan, yaitu Bidang Pangan :

- a. Belum optimalnya keterjangkauan akses dan jalur distribusi pangan masyarakat.
- b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman.
- c. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

Bidang Perkebunan :

- a. Belum optimalnya kuantitas, kualitas, pengembangan dan penerapan inovasi serta daya saing produk perkebunan.
- b. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan SDM petani dan kemampuan kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan).

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, DISPABUN Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus berupaya dalam memenuhi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan tersebut.

Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

a). Tantangan

- Masih perlunya peningkatan kualitas produk unggulan perkebunan.
- Masih perlunya peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi perkebunan dan olahan pangan lokal.
- Masih perlunya peningkatan jalur distribusi dan keterjangkauan akses pangan masyarakat.
- Masih perlunya membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi.

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pembinaan kepada petani/kelompok tani.

b). Peluang

- Masih luasnya pengembangan dan pemasaran produk-produk komoditas perkebunan.
- Masih luasnya upaya peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk olahan pangan lokal.

Berdasarkan uraian gambaran permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang pada urusan pangan dan perkebunan, serta pencapaian dalam tahapan pembangunan Kabupaten Cilacap jangka menengah Tahun 2017-2022, RKPD Tahun 2022 merupakan tahap ke-5 (tahun terakhir) RPJMD yang diarahkan pada upaya **“Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah mencapai universal akses (kumuh, sanitasi dan air minum)”**, dengan salah satu prioritas di sektor ekonomi yaitu pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan. Tahap ke-5 ini menjadi tahapan penting untuk mengukur capaian target pembangunan jangka menengah, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Untuk itu seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022.

2.4. Review terhadap RKPD 2022

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, DISPABUN Kabupaten Cilacap membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran yang membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022 dan guna terwujudnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan maka Rencana anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pangan dan Perkebunan di Tahun 2022 untuk pembiayaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan serta Urusan Pertanian sub urusan Perkebunan dengan Total rencana Belanja sebesar Rp. 16.913.946.226,- dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK bidang pertanian) sebesar Rp. 1.000.000.000,- serta Usulan APBD Provinsi/Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 600.000.000,-. Untuk Usulan APBD Kabupaten TA. 2022 sesuai Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 terdiri dari Program - program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.838.403.751,-, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 1.375.000.000,-, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 7.820.120.475,-, Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 522.201.000,-, Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 358.221.000,-. Sedangkan anggaran di Tahun 2020 Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap menerima alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.666.626.502,-. Hal ini disebabkan karena selama Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan terefocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pengadaan barang untuk bantuan kepada kelompok tani juga ada yang mengalami refocusing anggaran.

Dengan alokasi anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2022 harus benar – benar dilaksanakan dan terutama difokuskan untuk pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19.

Secara rinci analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersaji pada Tabel 2.3. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan
Kabupaten Cilacap

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra DISPABUN				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	PANGAN												
1	Pola Pangan Harapan (Skor)			% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan Bobot setiap kelompok pangan yg sudah ditetapkan (9 kelompok pangan : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, lainnya).	85,8	88,6	91,5	94,3	86,2	84,4	91,8	94,9	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)			Ketersediaan energi per kapita/hari (kkal) dibagi 2.400 kkal dikalikan 100 persen. Ketersediaan protein per kapita/hari (gram) dibagi 63 gram dikalikan 100 persen.	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase daerah rawan pangan yang ditangani (%)			Jumlah permohonan yg ditangani Jumlah permohonan yg masuk %	92	93	94	95	3178 0 kg 3400 0 kg 93,47	37.18 0 kg 39.91 0 kg 93,16	94	95	
4	Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (unit)			Angka Banyaknya/ Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan, Toko Tani, PUPM, Usaha Perorangan dll)	38	43	48	53	39	50	48	53	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Menurunnya peredaran jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya (%)			Jumlah makanan yang sudah tidak mengandung bahan berbahaya	(20-2)	(20-3)	(20-4)	(20-5)	(20-9)	(20-9)	(20-13)	(20-15)	
				Jumlah makanan yang masih mengandung bahan berbahaya	20	20	20	20	20	20	20	20	
				%	90	85	80	75	55	55	35	25	
6	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang teregistrasi (%)			Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diregistrasi	4	6	8	10	15	18	19	21	
				Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menjadi target registrasi	50	50	50	50	50	50	50	50	
				%	8	12	16	20	30	36	38	42	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B.	PERKEBUNAN												
1	Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina (%)			Jumlah Kelompok tani perkebunan yang telah dilakukan pembinaan	30	35	40	45	31	49	42	45	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	4,87	5,69	6,50	7,34	5,06	7,99	6,85	7,34	
2	Persentase kelompok tani yg diikutsertakan dlm promosi hasil perkebunan (%)			Jumlah kelompok tani yg diikutsertakan dlm promosi	8	10	13	15	9	2	13	15	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	1,33	1,67	2,00	2,44	1,47	0,33	2,00	2,44	
3	Persentase Petani & kel tani perkebunan yg memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (%)			Jumlah petani & kel tani perkebunan yg memanfaatkan teknologi tepat guna	27	37	47	58	27	42	50	60	
				Jumlah kelompok Tani Perkebunan di Kab. Cilacap	613	613	613	613	613	613	613	613	
				%	4,33	6,00	7,67	9,46	4,40	6,85	8,15	9,78	

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	DO	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(0)	(11)	(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(0)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)			Angka Produksi komoditas perkebunan selama Satu Tahun.	60.447,01	60.654,48	60.862,63	61.071,55	60.855,00	61.638,53	60.960	61.080,00	

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) semua indikator program sudah mencapai dan melebihi target yaitu pada indikator Menurunnya jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya yang ditarget 85% dapat mencapai 55% (tingkat capaian realisasi 135%). Indikator Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang teregistrasi yang ditarget 12% dapat mencapai 36% (tingkat capaian realisasi (300%), Indikator Pola Pangan Harapan dengan target skor 88,6 tercapai skor 84,4 (tingkat capaian realisasi 95,26%), Penanganan rawan pangan dari target 93% dapat mencapai 93,16% (tingkat capaian realisasi 100,17%) dan Indikator Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat yang ditarget 43 unit dapat mencapai 50 unit (tingkat capaian realisasi 116,28%). Sedangkan pada realisasi kegiatan semua dapat tercapai 100%.

Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) belum dapat tercapai 100% dari target karena hal ini berkaitan dengan keberagaman konsumsi pangan masyarakat dari 9 kelompok bahan pangan sebagai indikator Skor PPH. Makanan yang dikonsumsi masih didominasi karbohidrat/energi dari beras, masih rendahnya konsumsi energi dari umbi-umbian, pangan hewani (telur, daging, ikan) cukup dikonsumsi, sayur dan buah juga cukup dikonsumsi, kacang-kacangan dan minyak belum mencukupi dikonsumsi.

Pada sub urusan Perkebunan ada 4 program, namun yang mencapai target dan melebihi target yaitu pada program Peningkatan kesejahteraan petani dengan indikator Cakupan kelompok tani yang dibina dengan target 5,69% tercapai 7,99% (tercapai 140%), sedangkan indikator Produksi komoditas perkebunan dengan target 60.654,48 ton tercapai 61.638,53 ton (tercapai 101,62%). Sedangkan indikator persentase kelompok tani yang diikutsertakan promosi hasil perkebunan dengan target 1,67% tercapai 0,33% karena tidak dapat mengikuti pameran/promosi yang biasanya dilaksanakan tiap tahun, namun adanya pandemi/wabah covid-19 hanya dapat mengikutsertakan promosi komoditas perkebunan pada pembukaan Toko Mitra Tani Jl. Pemintalan Cilacap. Sedangkan indikator persentase petani dan kelompok tani perkebunan yang memanfaatkan teknologi tepat guna dari target 6% dapat tercapai sebesar 6,85% (114,17%). Faktor penyebab indikator yang belum tercapai karena adanya pandemi Covid-19 mulai Bulan Maret 2020, pelaksanaan kegiatan dihentikan karena tidak memungkinkan dilaksanakan pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan

pelatihan dan juga kegiatan – kegiatan mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran.

Terkait dengan hal tersebut upaya yang akan dilakukan adalah terus melaksanakan pembinaan kepada petani / kelompok tani agar tetap dapat memanfaatkan Teknologi Tepat Guna serta produksi komoditas perkebunan (8 komoditas perkebunan) akan dilakukan perhitungan di Tahun 2021 dan 2022 sehingga diharapkan di akhir Renstra / RPJMD dapat tercapai.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan.

DISPABUN Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Urusan Pangan dan Urusan Pertanian sub urusan Perkebunan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Cilacap yang perlu mendapatkan penanganan pada Tahun 2022 dan khususnya dalam pencapaian target kinerja pada Renstra DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 adalah belum optimalnya pencapaian target kinerja sub urusan perkebunan. Adapun permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, yaitu :

- 1) Permasalahan pangan :
 - a. Kabupaten Cilacap dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang tersebar sehingga mengakibatkan belum optimal dalam keterjangkauan akses dan distribusi pangan masyarakat.
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
 - c. Kabupaten Cilacap memiliki potensi sebagai daerah yang rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan dll) serta masih adanya penduduk yang tergolong miskin (rawan pangan kronis).

2). Permasalahan perkebunan :

- a. Masih kurangnya pemeliharaan tanaman perkebunan di tingkat petani sehingga belum optimalnya produksi komoditas perkebunan.
- b. Masih kurangnya pengembangan dan penerapan inovasi serta masih kurangnya daya saing produk perkebunan di tingkat petani/kelompok tani.
- c. Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM dan kemampuan kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan).

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan pangan dan perkebunan di Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasi beberapa isu -isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pangan dan perkebunan, yaitu Bidang Pangan :

- a. Belum optimalnya keterjangkauan akses dan jalur distribusi pangan masyarakat.
- b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman.
- c. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

Bidang Perkebunan :

- a. Belum optimalnya kuantitas, kualitas, pengembangan dan penerapan inovasi serta daya saing produk perkebunan.
- b. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan SDM petani dan kemampuan kelembagaan petani (kelompok tani/gapoktan).

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, DISPABUN Kabupaten Cilacap sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus berupaya dalam memenuhi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pangan dan Perkebunan tersebut.

Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

a). Tantangan

- Masih perlunya peningkatan kualitas produk unggulan perkebunan.
- Masih perlunya peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi perkebunan dan olahan pangan lokal.
- Masih perlunya peningkatan jalur distribusi dan keterjangkauan akses pangan masyarakat.
- Masih perlunya membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi seimbang dan aman dikonsumsi.

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pembinaan kepada petani/kelompok tani.

b). Peluang

- Masih luasnya pengembangan dan pemasaran produk-produk komoditas perkebunan.
- Masih luasnya upaya peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk olahan pangan lokal.

Berdasarkan uraian gambaran permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang pada urusan pangan dan perkebunan, serta pencapaian dalam tahapan pembangunan Kabupaten Cilacap jangka menengah Tahun 2017-2022, RKPD Tahun 2022 merupakan tahap ke-5 (tahun terakhir) RPJMD yang diarahkan pada upaya **“Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah mencapai universal akses (kumuh, sanitasi dan air minum)”**, dengan salah satu prioritas di sektor ekonomi yaitu pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan. Tahap ke-5 ini menjadi tahapan penting untuk mengukur capaian target pembangunan jangka menengah, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta pengendalian pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Untuk itu seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022.

2.4. Review terhadap RKPD 2022

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, DISPABUN Kabupaten Cilacap membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran yang membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022 dan guna terwujudnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perkebunan maka Rencana anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pangan dan Perkebunan di Tahun 2022 untuk pembiayaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan serta Urusan Pertanian sub urusan Perkebunan dengan Total rencana Belanja sebesar Rp. 16.913.946.226,- dengan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK bidang pertanian) sebesar Rp. 1.000.000.000,- serta Usulan APBD Provinsi/Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 600.000.000,-. Untuk Usulan APBD Kabupaten TA. 2022 sesuai Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 terdiri dari Program - program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.838.403.751,-, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 1.375.000.000,-, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 7.820.120.475,-, Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 522.201.000,-, Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 358.221.000,-. Sedangkan anggaran di Tahun 2020 Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap menerima alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.666.626.502,-. Hal ini disebabkan karena selama Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan terefocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pengadaan barang untuk bantuan kepada kelompok tani juga ada yang mengalami refocusing anggaran.

Dengan alokasi anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2022 harus benar – benar dilaksanakan dan terutama difokuskan untuk pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19.

Secara rinci analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersaji pada Tabel 2.3. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2022
Kabupaten Cilacap

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16,913,946,226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16,913,946,226
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,838,403,751	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,838,403,751
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (persen)	- Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	100			Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (persen)	- Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan	100			
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (persen)		100			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (persen)		100			
		Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD (persen)	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Dispabun Kab. Cilacap	100			Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD (persen)	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Dispabun Kab. Cilacap	100			

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan (persen)		100			Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan (persen)		100		
		Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan (bulan)		12			Tersedianya Administrasi Perkantoran setiap bulan (bulan)		12		
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terbayarnya Jasa Honorarium PNS Dan Non PNS Dispabun Kab. Cilacap		40,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terbayarnya Jasa Honorarium PNS Dan Non PNS Dispabun Kab. Cilacap		40,000,000	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)		7			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)		7		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25,000,000	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dokumen renja, renja perubahan dan renstra DISPABUN (dokumen)	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dispabun Kab. Cilacap	3.00			dokumen renja, renja perubahan dan renstra DISPABUN (dokumen)	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dispabun Kab. Cilacap	3.00		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		3	25,000,000		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		3	25,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,000,000	
		Laporan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP (dokumen)		4	15,000,000		Laporan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP (dokumen)		4	15,000,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,198,120,581	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,198,120,581	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,198,120,581	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5,198,120,581	
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISPABUN (bulan)	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISPABUN (bulan)	12	5,198,120,581		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISPABUN (bulan)	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISPABUN (bulan)	12	5,198,120,581	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				831,856,950	Administrasi Umum Perangkat Daerah				831,856,950	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)		12			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (bulan)		12		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)		12	86,236,950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis, peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)		12	86,236,950	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor DISPABUN (bulan)		12	115,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor DISPABUN		12	115,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor DISPABUN Kab Cilacap		12	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor DISPABUN		12	35,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (bulan)		12	595,620,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah			595,620,000	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (bulan)		12	500,421,300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	500,421,300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor DISPABUN Kab Cilacap (bulan)		12	70,782,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor DISPABUN Kab Cilacap (bulan)		12	70,782,800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa Honorarium PNS dan Non PNS DISPABUN Kab Cilacap (bulan)	Honorarium PNS dan Non PNS DISPABUN	12	429,638,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa Honorarium PNS dan Non PNS DISPABUN Kab Cilacap (bulan)	Honorarium PNS dan Non PNS DISPABUN	12	429,638,500	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (unit)		60	268,004,920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (unit)		60	268,004,920	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor DISPABUN Kab Cilacap (unit)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	75	25,990,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor DISPABUN Kab Cilacap (unit)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	75	25,990,000	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabilitasinya gedung kantor DISPABUN (unit)	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	2	47,816,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terehabilitasinya gedung kantor DISPABUN (unit)	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor	2	47,816,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (persen)		100	1,375,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (persen)		100	1,375,000,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan (kelompok)			1,375,000,000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan (kelompok)			1,375,000,000	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				1,225,000,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				1,225,000,000	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				150,000,000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				150,000,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)		94,3	7,820,120,475	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)		94,3	7,820,120,475	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (unit)		53			Jumlah Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (unit)		53		
		Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina (persen)		7,30			Cakupan kelompok tani perkebunan yang dibina (persen)		7,30		
		Persentase kelompok tani yang diikutsertakan dalam promosi hasil perkebunan (persen)		2,33			Persentase kelompok tani yang diikutsertakan dalam promosi hasil perkebunan (persen)		2,33		
		Persentase petani dan kelompok tani perkebunan yang memanfaatkan teknologi tepat guna (persen)		9,33			Persentase petani dan kelompok tani perkebunan yang memanfaatkan teknologi		9,33		
		Produksi Komoditas Perkebunan (ton)		61071,55			Produksi Komoditas Perkebunan (ton)		61071,55		

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.3-27.0-0.0-0.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (kelompok)		45	4,713,996,875	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (kelompok)		45	4,713,996,875	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				36,500,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				36,500,000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4,536,822,675	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4,536,822,675	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				45,000,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				45,000,000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				90,849,200	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				90,849,200	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				4,825,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				4,825,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok dibina dalam rangka Pengembangan Konsumsi Pangan (kelompok)		35	3,106,123,600	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok dibina dalam rangka Pengembangan Konsumsi Pangan (kelompok)		35	3,106,123,600	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				1,520,000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				1,520,000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3,104,603,600	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3,104,603,600	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani (persen)		95	522,201,000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani (persen)		95	522,201,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Rawan Pangan (dokumen)		1	7,035,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penanganan Rawan Pangan (dokumen)		1	7,035,000	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (dokumen)		1	7,035,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (dokumen)		1	7,035,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Penanganan Rawan Pangan (kelompok)		20	515,166,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Penerima Penanganan Rawan Pangan (kelompok)		20	515,166,000	

No.	RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pangan untuk daerah rawan pangan (kegiatan)		2	515,166,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pangan untuk daerah rawan pangan (kegiatan)		2	515,166,000	
2.09.3-27.0-0.0-0.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diregistrasi (Produk PSAT)		10	358,221,000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diregistrasi (Produk PSAT)		10	358,221,000	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				289,170,700	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				289,170,700	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				27,299,900	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				27,299,900	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				41,750,400	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				41,750,400	

Usulan kegiatan-kegiatan pada Tabel 2.3 tersebut diatas juga dalam upaya mencapai SDGs (Sustainable Development Goals) yang terkait tentang penanggulangan kemiskinan, penanganan rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat serta upaya dalam peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas perkebunan serta sebagai salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dapat menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada Dinas Pangan dan Perkebunan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari kunjungan ke lapangan maupun dari permasalahan yang timbul di masyarakat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dan prioritas dalam penyusunan rancangan rencana kerja ini adalah hasil dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Dinas Pangan dan Perkebunan untuk membuat usulan program / kegiatan dengan tetap berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan dari Dinas Pangan dan Perkebunan. Semua usulan program dan kegiatan tersebut terintegrasi dalam aplikasi SIPD.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Cilacap

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.</p> <p>Pekerjaan : Bantuan Peralatan Alat Produksi Pengolahan Pangan Lokal (Spinner, alat kemas, alat produksi olahan) u KWT Al Hasanah Desa Mulyadadi Kec. Cipari</p>	Desa Mulyadadi Kec. Cipari	<p>Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>Jumlah kelompok dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan</p>	1 paket	Usulan masuk dalam renja 2022 karena sesuai kewenangan atau Tupoksi Dinas Pangan dan Perkebunan serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam olahan pangan lokal.
No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran / Volume	Catatan

			Kinerja		
1	2	3	4	5	6
2.	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.</p> <p>Pekerjaan : Penyediaan sarana pengolahan kelapa (bantuan peralatan pengolahan gula kelapa kristal) di Kelompok Tani Murih Makmur</p>	Desa Sumingkir Kec. Jeruklegi	<p>Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>Jumlah kelompok dibina dalam rangka pengembangan konsumsi pangan</p>	1 paket	Usulan masuk dalam renja 2022 karena sesuai kewenangan atau Tupoksi Dinas Pangan dan Perkebunan serta pemberdayaan masyarakat dalam usaha olahan komoditas perkebunan.

No	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Sub. Keg. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kelapa Genjah pada KT Kerabat Sari Desa Mekarsari Kec. Cipari</p>	Desa Mekarsari Kec. Cipari	<p>Pola Pangan Harapan (PPH)</p> <p>Jumlah kelompok dibina dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</p>	1 paket	Usulan masuk dalam renja 2022 karena sesuai kewenangan atau Tupoksi Dinas Pangan dan Perkebunan serta salah satu upaya penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dengan komoditas perkebunan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut sejalan dengan Visi Indonesia dalam RPJPN 2005-2025 yaitu : Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sasaran Visi Indonesia 2045 yang mencakup:

- 1).Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2). Pembangunan Infrastruktur.
- 3). Penyederhanaan Regulasi.
- 4). Penyederhanaan birokrasi.
- 5). Transformasi ekonomi.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2022 dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang menjadi prioritas nasional, meliputi :

- 1). Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 2). Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3). Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4). Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5). Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6). Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7). Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi pada RPJMN tahun 2020-2024, yang terkait dengan sektor pangan dan perkebunan, yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi : meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan, meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok, meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar, menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi, meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

2. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi : meningkatkan pendalaman sektor keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0, meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi terutama pangan dan pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perkebunan

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahun 2022 sesuai RPJMD Tahun 2017-2022, maka kebijakan pembangunan ekonomi di Tahun 2022 diarahkan pada prioritas Pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan, dan difokuskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pertanian, perkebunan dan pangan, peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk menciptakan nilai tambah dan keragaman produk, peningkatan minat investasi (padat karya) dan ekspor berbasis produk-produk unggulan Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2022 tersebut dan sesuai Renstra Tahun 2017-2022 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap seperti pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019 (n-3)	Capaian Tahun 2020 (n-2)	Prediksi Tahun 2021 (n-1)	Proyeksi Tahun 2022 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			86,2	84,4	91,5	94,3
			Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,2	84,4	91,5	94,3
2.	Meningkatkan produksi komoditas perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan			60.855,00	61.638,53	60.862,63	61.071,55
			2.a.Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	Produktivitas tanaman perkebunan :				
				- Produktivitas Kelapa Dalam	1.134,22	1.119,16	1.048,72	1.053,96
				- Produktivitas kelapa deres	8.945,46	9.132,60	8.881,08	8.907,72
				- Produktivitas kopi	672,28	671,85	603,01	604,81

No	Tujuan	Indikatorr Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019 (n-3)	Capaian Tahun 2020 (n-2)	Prediksi Tahun 2021 (n-1)	Proyeksi Tahun 2022 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				- Produktivitas kakao	817,12	774,90	761,11	762,63
				Produktivitas Pala	300,27	266,46	227,66	228,80
				- Produktivitas Cengkeh	345,69	344,58	328,92	329,90
				- Produktivitas Karet	1.249,03	1.263,76	1.218,11	1.221,76
				- Produktivitas Lada	597,57	585,06	578,53	580,27
			2.b.Meningkatnya Kapasitas Kelompok Tani Perkebunan	2.b.1).Cakupan Kelompok Tani perkebunan yg dibina	5,06	7,99	6,50	7,30
				2.b.2).Perse ntase kelompok tani yang diikutsertakan dlm promosi hasil perkebunan.	1,47	0,33	2,00	2,33
				2.b.3).Perse ntase petani dan kelompok tani yg memanfaatkan teknologi tepat guna.	4,40	6,85	7,67	9,33

3.3. Inovasi Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, maka beberapa inovasi yang dilakukan oleh DISPABUN dalam upaya peningkatan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1) One Day No Rice (Satu Hari Tanpa Makan Nasi).

Sesuai Surat Edaran Bupati Cilacap No. 526/04847/34/Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Himbauan Gerakan Mengonsumsi Pangan Lokal. Gerakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras/nasi serta untuk mendukung pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi) dalam hal keragaman pangan yang bergizi dan seimbang. Pengganti nasi dapat dilakukan dengan makan olahan umbi-umbian atau jagung dll (non beras) yang dipadukan dengan jenis makanan lain (sayur-sayuran dan buah-buahan) sehingga diharapkan dengan keragaman pangan dan kecukupan gizi yang seimbang dapat terwujud. Saat ini implementasi dari himbauan Surat Edaran Bupati Cilacap masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di dinas/instansi karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras/nasi. Namun DISPABUN terus mengupayakan pengenalan dan pembinaan berbagai olahan pangan lokal baik melalui pelatihan jasa boga/home industry maupun lomba-lomba olahan pangan lokal.

2) Beras untuk PNS.

Program ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 7 September 2018 yang disosialisasikan ke seluruh OPD, kecamatan eks. Kotif dan Bagian lingkup Setda Cilacap. Program ini dimaksudkan agar Beras yang dihasilkan oleh para petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Cilacap dibeli dan dinikmati oleh masyarakat Cilacap. Pembelian beras Cilacap oleh aparat/PNS Kabupaten Cilacap dapat dianggap sebagai wujud semangat ikut membangun daerah guna mendukung Gerakan Bangga Mbangun Desa. Beras untuk PNS disuplai/didukung dari Beras yang dihasilkan oleh Petani/Kelompok Tani/ Gapoktan-gapoktan yang ada di Kabupaten Cilacap. Sampai dengan saat ini program Beras PNS telah berjalan dengan baik dengan rata-rata suplai beras untuk PNS sebesar 6 ton/bulan. Harapan kedepan untuk Program ini dapat berkembang lebih luas di PNS wilayah kecamatan-kecamatan dan PNS dari instansi vertikal.

3) Pengembangan Toko Tani Indonesia.

Tahun 2018 program Toko Tani Indonesia (TTI) diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan

Toko/warung/kios milik pedagang komoditas pangan baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan dan strategis dari Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (Gapoktan) dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tujuan dari TTI untuk membantu stabilisasi harga pangan utama (beras) dan lainnya yang berasal dari produksi petani/kelompok tani yang ada di Kab. Cilacap. Toko Tani Indonesia menerima beras dari Gapoktan dan menjualnya dengan harga sesuai ketentuan (dibawah harga pasar). TTI berfungsi untuk membantu keterjangkauan akses pangan masyarakat. Sampai dengan saat ini Toko Tani Indonesia yang ada di Kabupaten Cilacap telah berjumlah 38 unit yang tersebar di beberapa kecamatan/wilayah dan masih berjalan aktif hingga saat ini.

- 4). Penanganan Rawan Pangan melalui Aplikasi ATINA (Ana Laporan, Tiliki, Jujugna). Aplikasi ATINA merupakan aplikasi yang sudah ada di Website DISPABUN dan juga berbasis android. Aplikasi ATINA sebagai upaya penanganan rawan pangan yang dibuat di Tahun 2018 oleh Seksi Kerawanan Pangan DISPABUN untuk mempercepat tindakan penanganan kerawanan pangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap dan dapat segera disampaikan melalui Aplikasi dan tindak lanjut penanganannya. Sampai dengan saat ini Aplikasi ATINA masih berfungsi, namun penggunaannya masih kurang karena kecenderungan pelaporan kejadian kerawanan pangan di wilayah dilakukan masih secara manual.

3.4. Program dan Kegiatan DISPABUN Kabupaten Cilacap

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022 diperlukan rumusan program dan kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan, antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
- 2) Keserasian dan keselarasan pembangunan baik perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan perkebunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.
- 3) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

- 4) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pangan dan perkebunan di Kabupaten Cilacap.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan perkebunan Kabupaten Cilacap serta untuk keperluan penyusunan perencanaan anggaran (budgeting).
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 adalah sebanyak 10 program yang terdiri 5 program untuk Program keperluan rutin dan 1 Program untuk Urusan Pangan dan 4 Program untuk Sub Urusan Perkebunan, sedangkan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Permendagri No. 050-3708 Tahun 2020 sebanyak 5 program, 11 kegiatan, 26 sub kegiatan
- 3) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 secara total sebesar Rp. 16.913.946.226,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD Provinsi (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT) sebesar Rp. 600.000.000,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK Bidang Pertanian) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pemulihan dan penguatan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19. Selain itu kebijakan pendanaan juga diarahkan sebagai upaya pencapaian target Renstra Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yang disertai dengan indikator

kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2022. Sedangkan Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 dengan KepMen 050/3708/2020 sebagaimana pada Tabel 4.2.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										16,913,946,226		23,895,000,000			
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,838,403,751		8,390,000,000		
2	09	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,000,000		40,000,000	
2	09	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Dokumen renja, renja perubahan dan renstra DISPABUN	Tingkat capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	100 %	3 dokumen	50 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100 %	20,000,000
2	09	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	Laporan evaluasi, monitoring dan pelaporan SAKIP	Tingkat capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	100 %	4 dokumen	50 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel	100 %	20,000,000
2	09	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,198,120,581		6,000,000,000	
2	09	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISPABUN	Tingkat ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	100 %	5,198,120,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan	6,000,000,000
2	09	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										831,856,950		1,175,000,000	
2	09	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Tersedianya alat tulis dan peralatan perlengkapan kantor	Tingkat capaian ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	25 %	86,236,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	100,000,000
2	09	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran setiap	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu	Tingkat capaian ketersediaan administrasi umum	Kab. Cilacap, Cilacap	12 bulan	12 bulan	25 %	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran setiap	12 bulan	125,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		bulan	kantor DISPABUN	perangkat daerah	Utara, Gumilir						(PAD)		bulan		
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor DISPABUN	Tingkat capaian ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	25 %	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	50,000,000
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Tingkat capaian ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	25 %	595,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	900,000,000
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								500,421,300						585,000,000
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor DISPABUN	Tingkat capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	50 %	70,782,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	85,000,000
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS Dispabun	Tingkat capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	12 bulan	12 bulan	50 %	429,638,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	500,000,000
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								268,004,920						590,000,000
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor DISPABUN	Tingkat capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	100 %	30 unit	33 %	194,198,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	200,000,000
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Jumlahh sarana dan prasarana kantor DISPABUN	Tingkat capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Cilacap, Cilacap	100 %	75 unit	33 %	25,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	40,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				penunjang urusan perangkat daerah	Utara, Gumilir					(PAD)				
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Terpelihara dan rehabilitasi gedung kantor DISPABUN	Tingkat capaian pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Cilacap, Cilacap Utara, Gumilir	100 %	2 unit	33 %	47,816,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100 %	350,000,000
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								1,375,000,000				1,700,000,000	
2 09 02 2.0 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1,375,000,000				1,700,000,000	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Pelatihan lumbung pangan masyarakat Pembangunan lumbung pangan masyarakat Survey Kondisi Lumbung Pangan Masyarakat at	Tingkat capaian penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 orang 2 unit 1 kegiatan	50 %	1,225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi dan protein per kapita	100 %	1,500,000,000
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Pengisian lumbung pangan masyarakat Sosialisasi pengisian lumbung pangan masyarakat	Tingkat capaian penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 unit 80 orang	50 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan energi dan protein per kapita	100 %	200,000,000
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								7,820,120,475				12,310,000,000	
2 09 03 2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								4,713,996,875				6,275,000,000	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pola Pangan Harapan (PPH)	Media Informasi Ketahanan Pangan Penyusunan data ketahanan pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Penyusunan Sistem Informasi Pangan	Tingkat capaian penyediaan dan penyaluran pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	1 paket 12 dokumen 1 dokumen 2 kegiatan	25 %	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	75,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Tingkat capaian penyediaan dan penyaluran pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	10 kegiatan	25 %	4,536,822,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	6,000,000,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH)	Pemantauan ketersediaan pangan	Tingkat capaian penyediaan dan penyaluran pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	2 kegiatan	25 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	60,000,000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH)	Bimtek pemantauan dan akses pangan masyarakat Bimtek Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Pelatihan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Penanganan Stabilisasi Harga Pangan Utama (Beras) Sosialisasi keterjangkauan dan akses pangan masyarakat	Tingkat capaian penyediaan dan penyaluran pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	20 orang 35 orang 70 orang 2 Gapoktan 30 orang	25 %	90,849,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	125,000,000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pola Pangan Harapan (PPH)	Bimtek Pengembangan usaha pangan masyarakat	Tingkat capaian penyediaan dan penyaluran pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	35 orang	25 %	4,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	15,000,000
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								3,106,123,600				6,035,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Pola Pangan Harapan (PPH)	Penyusunan Pola Pangan Harapan	Tingkat capaian target konsumsi pangan masyarakat	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	1 dokumen	75 %	1,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	35,000,000
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pola Pangan Harapan (PPH)	Diversifikasi tanaman (Berlian PKK) Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kab. Cilacap Lomba Cipta Menu B2Sa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Pangan Lokal khas wilayah tingkat regional di TMII Media Luar ruang cinta produk pangan lokal di Kab. Cilacap Pelatihan pangan lokal bagi jasa boga Pelatihan pangan lokal bagi Pelaku Home Industry Pelatihan pelaku usaha perkebunan pelatihan pengolahan hasil perkebunan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pembinaan ketrampilan masyarakat (DBHCHT) Pengadaan alat pasca panen perkebunan Peningkatan ketahanan pangan dan	Tingkat capaian target konsumsi pangan masyarakat	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,3 Skor	15 lokasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 125 orang 125 orang 3 komoditas 4 komoditas 13 lokasi 4 lokasi 5 komoditas 30 kelompok 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan	75 %	3,104,603,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pola Pangan Harapan (PPH)	94,3 Skor	6,000,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			gizi keluarga Pertemuan asosiasi petani perkebunan Promos HPS Tk. Provinsi Jawa Tengah Promosi Hasil Perkebunan											
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								522,201,000					1,020,000,000
2 09 04 2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								7,035,000					20,000,000
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Tingkat capaian ketersediaan dokumen penanganan rawan pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 dokumen	100 %	7,035,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	95 %	20,000,000
2 09 04 2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								515,166,000					1,000,000,000
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	Jumlah bahan pangan beras untuk cadangan pangan Jumlah bahan pangan non beras (kacang ijo) untuk bantuan rawan pangan Sosialisasi pemantauan daerah rawan pangan	Tingkat capaian penanganan rawan pangan	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	54.9 ton 7.25 ton 2 lokasi	80 %	515,166,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	95 %	1,000,000,000
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								358,221,000					475,000,000
2 09 05 2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								358,221,000					475,000,000
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	Operasional TJKPD Pembinaan keamanan pangan pada home industry Pembinaan keamanan	Tingkat Capaian pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua	20 %	1 kegiatan 5 lokasi 6 lokasi 5 lokasi 2 kegiatan	33 %	289,170,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	20 %	400,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			pangan pada usaha olahan pangan Pembinaan keamanan pangan pada warung sekolah Promosi mutu dan keamanan pangan mass media dan radio Sosialisasi batas maksimum residu pestisida Sosialisasi mutu dan keamanan pangan TP- PKK Workshop JKPD Workshop mutu dan keamanan pangan		Kelurahan		3 lokasi 5 lokasi 100 orang 35 orang			Umum				
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	Registrasi keamanan pangan	Tingkat Capaian pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 kegiatan	33 %	27,299,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	20 %	50,000,000
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	Pengadaan sarana prasarana keamanan pangan	Tingkat Capaian pengawasan keamanan pangan segar	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 paket	33 %	41,750,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Teregistrasi	20 %	25,000,000
TOTAL									16,913,946,226					23,895,000,000

Tabel 4.2
HASIL MAPPING PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 050-3708 TAHUN 2020

PERMENDAGRI 13/2006 (Ranwal RKPD Hasil Konsultasi Publik)				KEPMEN 050-3708				
KODE	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		13,136,234,280	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			21,078,734,280
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,000,000,000
2.09 2.09 .0101 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,680,000,000					
2.09 2.09 .0101 .01 .02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	450,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .10		Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .17		Penyediaan makanan dan minuman	115,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115,000,000
2.09 2.09 .0101 .01 .18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	900,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900,000,000
2.09 2.09 .0101 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		571,234,280					
2.09 2.09 .0101 .02 .9		Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000
2.09 2.09 .0101 .02 .22		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	46,595,160	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46,595,160
2.09 2.09 .0101 .02 .24		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	194,639,120	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	194,639,120
2.09 2.09 .0101 .02 .30		Pemeliharaan rutin/ berkala	30,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000
2.09 2.09 .0101 .02 .42		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	250,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250,000,000
2.09 2.09 .0101 .03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		30,000,000					
2.09 2.09 .0101 .03 .05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32,500,000
2.09 2.09 .0101 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25,000,000					
2.09 2.09 .0101 .05 .01		Pendidikan dan pelatihan formal	25,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000
2.09 2.09 .0101 .07	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja		40,000,000					
2.09 2.09 .0101 .07 .01		Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	25,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000
2.09 2.09 .0101 .07 .03		Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP	15,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.01 .2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000
2.09 2.09 .0101 .16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)							
2.09 2.09 .0101 .16 .01		Penanganan Daerah Rawan Pangan	850,000,000	2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.04 .2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10,000,000
				2.09 .3-27 .0-0-0-0 .09.04 .2.02	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	850,000,000

PERMENDAGRI 13/2006 (Ranwal RKPD Hasil Konsultasi Publik)				KEPMEN 050-3708				
2.09.2.09.0101.16.09		Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan	300,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25,000,000
				2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,775,000,000
2.09.2.09.0101.16.10		Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	100,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	93,000,000
				2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	7,000,000
2.09.2.09.0101.16.14		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	250,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250,000,000
2.09.2.09.0101.16.16		Pengembangan Diversifikasi Tanaman	120,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	120,000,000
2.09.2.09.0101.16.22		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	200,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.05.2.01	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	151,000,000
				2.09.3-27.0-0-0-0.09.05.2.01	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000
				2.09.3-27.0-0-0-0.09.05.2.01	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000
2.09.2.09.0101.16.39		Pengembangan Cadangan Pangan	200,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktru Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	150,000,000
2.09.2.09.0101.16.41		Pemantauan Ketersediaan Pangan	50,000,000	2.09.3-27.0-0-0-0.09.03.2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5,000,000

PERMENDAGRI 13/2006 (Ranwal RKPD Hasil Konsultasi Publik)				KEPMEN 050-3708															
				2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan	45,000,000							
2.09	2.09	.0101	.16 .43						Promosi Keamanan Pangan	75,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.05	2.01	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .44						Pengembangan Pangan Lokal	170,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	170,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .45						Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Lokal	25,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .49						Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry	60,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .50						Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan Segar	90,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .51						Pengembangan Diversifikasi Pangan	155,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	155,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .57						Pengembangan lumbung pangan masyarakat	225,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.02	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	275,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .58						Penyusunan Sistem Informasi Pangan	40,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .59						Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).	100,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .63						Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)	50,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50,000,000
2.09	2.09	.0101	.16 .64						Lumbung Pangan Masyarakat (DAK PERTANIAN)	1,000,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.02	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1,000,000,000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			6,730,000,000															
3.27	2.09	.0101	.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	125,000,000														
3.27	2.09	.0101	.15 .17	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan	90,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	111,000,000					
3.27	2.09	.0101	.15 .18	Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih Perkebunan	35,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35,000,000					
3.27	2.09	.0101	.16	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	175,000,000														

PERMENDAGRI 13/2006 (Ranwal RKPD Hasil Konsultasi Publik)				KEPMEN 050-3708											
3.27	.2.09	.0101	.16 .16		Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan	175,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	230,000,000
3.27	.2.09	.0101	.17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		1,530,000,000									
3.27	.2.09	.0101	.17 .02		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	1,300,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,355,000,000
3.27	.2.09	.0101	.17 .29		Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan	75,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	75,000,000
3.27	.2.09	.0101	.17 .30		Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan	30,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30,000,000
3.27	.2.09	.0101	.17 .31		Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	125,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	166,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		4,900,000,000									
3.27	.2.09	.0101	.18 .13		Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)	450,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	450,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .29		Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan	150,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .30		Pengembangan Perbenihan Perkebunan	100,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .37		Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan	500,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	500,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .38		Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan	200,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .50		Peremajaan tanaman perkebunan	1,500,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,500,000,000
3.27	.2.09	.0101	.18 .51		Pengembangan tanaman perkebunan	2,000,000,000	2.09	.3-27	.0-0-0-0	.09.03	2.01	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2,000,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2022. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2022 terutama dalam upaya pemulihan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Cilacap.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renja antara lain :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi/DBHCHT serta Dana APBN (Dana Alokasi Khusus) harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap, RKPD Kabupaten Cilacap dan Renstra Perangkat Daerah).
- 2) Program/kegiatan yang direncanakan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan produk perencanaan maka pelaksanaan program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
- 2) Renja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi dengan Perangkat Daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- 3) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun lalu agar dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai terutama juga dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.
- 1) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renja DISPABUN Kabupaten Cilacap Tahun 2022 ini selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. Renja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang khususnya dalam upaya pemulihan dampak dari pandemi Covid-19 oleh para pimpinan manajemen dan pengambil kebijakan DISPABUN Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Cilacap, Agustus 2021

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP



Ir. SUSILAN

Rembina Utama Muda

NIP. 19641108 199103 1 006

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI